

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Secara umum, instansi pemerintahan memiliki peran untuk melayani masyarakat sesuai dengan bidangnya masing-masing, baik di pusat atau daerah. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan dan pengguna anggaran negara, maka perlu menyelenggarakan pengelolaan keuangan sesuai dengan rencana yang diputuskan oleh berbagai instansi serta bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Dalam konteks ini, perlu dikembangkan dan diterapkan sistem akuntabilitas yang benar, jelas, terukur dan sah sehingga pemerintah dan pengelola pembangunan bisa bekerja dengan efisien, efektif dan akuntabel, menghindari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pertanggungjawaban tersebut berupa penyampaian laporan keuangan.

Laporan keuangan terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pasal 30 (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengacu pada pelaporan keuangan lembaga negara dan organisasi lain. Laporan Keuangan Tahunan Pemerintah disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan

kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan pemerintah pada hakekatnya merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik yang berasal dari pajak, retribusi, maupun transaksi lainnya. Undang-undang ini dirancang untuk membantu pemerintah daerah menerapkan otonomi daerah dengan lebih baik. Tata pemerintahan yang baik dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berhasil diadopsi dilaksanakan secara efisien, dan dipertanggungjawabkan kepada publik

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya Permendagn No. 77 Tahun 2020, yang meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah, dalam rangka menyelenggarakan penyusunan laporan keuangan daerah yang kondusif bagi penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan penyusunan laporan keuangan daerah secara kondusif untuk good governance. Pendapatan mentah, dana perimbangan, dan bentuk pendapatan lain yang dapat diterima semuanya termasuk dalam kategori pendapatan daerah. Rencana keuangan pemerintah negara bagian, yang disajikan dalam bentuk numerik dan mencakup pendapatan dan pengeluaran, dikenal sebagai anggaran negara. untuk jumlah waktu yang telah ditentukan, paling sering untuk jangka waktu satu tahun.

Tentang pembahasan PSAK NO.4 tentang akun keuangan konsolidasi dan laporan keuangan individual. "laporan keuangan kelompok usaha yang

menyediakan informasi keuangan perusahaan utama dan anak perusahaan seolah-olah mereka adalah satu unit ekonomi” adalah definisi dari laporan keuangan konsolidasi.

Sekretariat Kabupaten Bangkalan merupakan koordinator seluruh unit kerja pemerintah kabupaten guna mendukung kebijakan bupati dalam tugas desentralisasi dan pembantuan. Fungsi sekretaris daerah adalah merumuskan kebijakan pemerintah daerah, mengkoordinasikan pengelolaan keuangan daerah, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas instansi pemerintah daerah, menyusun rencana kerja dan menetapkan tugas. Terkait dengan tanggung jawabnya sekretaris daerah memiliki sejumlah kewenangan perizinan, seperti izin proyek pembangunan, dan lain-lain. Bagian Perencanaan dan Keuangan memiliki tugas untuk memfasilitasi dan mengkoordinasikan dan merumuskan bahan pembinaan bidang keuangan dan perlengkapan serta Rumah Tangga di lingkungan Sekretariat Daerah

Penelitian Rafid RZ sebelumnya menjadi acuan dalam penelitian ini. Penentuan Kualitas Pelaporan Keuangan: Pengaruh Moderasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Hubungan Pengetahuan Standar Akuntabilitas Pemerintah Dengan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016 yang telah menemukan bagaimana pengendalian intern serta kesesuaian laporan keuangan yang telah dihasilkan dengan SAP yang berlaku dan terbukti pula bahwa SDM yang kurang kompeten menjadi kendala dalam melaksanakan pertanggung jawaban anggaran. Berdasarkan penelitian terdahulu yang menjelaskan hasil berupa kesamaan faktor di beberapa daerah dalam penyusunan laporan keuangannya, maka pada penelitian ini memiliki perbedaan yang terletak

pada objek yang diteliti dan menelaah lebih dalam bagaimana proses dan kendala dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Peneliti melakukan analisa mulai dari perencanaan anggaran hingga laporan keuangan dapat disajikan. Proses penyusunan laporan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal saja tetapi bisa dari faktor eksternal yang memiliki peran dalam penyusunan laporan.

Penelitian sebelumnya lebih banyak menggunakan jenis kuantitatif dengan metode kuisisioner yang hanya memperhatikan beberapa faktor dalam penyusunan laporan keuangan. daerah Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif karena belum ada riset yang menunjukkan proses penyusunan Laporan Keuangan Daerah secara kualitatif. Berdasarkan Masalah tersebut, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui sistem penyusunan laporan keuangan konsolidasi pada Badan Perencanaan dan keuangan kabupaten Bangkalan.

Adapun kondisi di Lapangan, menurut Kepala bagian Perencanaan dan Keuangan Daerah pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan mengatakan ada beberapa kendala di dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yakni karyawan atau staff pekerja kurang paham atau kurang mengerti terkait pengoperasian sistem SIPD. Dengan adanya kendala di atas menyebabkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau Laporan Keuangan Konsolidasi menjadi terhambat. Pemilihan Kantor Sekretariat Daerah bagian Perencanaan dan Keuangan Kabupaten Bangkalan sebagai objek penelitian karena lembaga pemerintah tersebut mempunyai fungsi yakni sebagai SKPD sehingga ingin mengetahui bagaimana system dalam penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi Kabupaten Bangkalan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengambil topik "**Proses Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan**"

## **1.2 Topik yang Dilaporkan pada Praktek Kerja Lapangan.**

Topik yang di angkat dari praktek kerja lapangan ini yaitu “proses penyusunan laporan keuangan SKPD pada kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan”

## **1.3 Tujuan Pelaporan Praktek Kerja Lapangan**

Tujuan dari praktek kerja lapangan ini ialah untuk mengetahui bagaimana Sistem Penyusunan Laporan Keuangan SKPD pada badan Perencanaan dan Keuangan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan.

## **1.4 Tinjauan Pustaka**

### **1.4.1 Proses**

Menurut Handyaningrat proses adalah “serangkaian tahap kegiatan mulai dari menentukan sasaran sampai tercapainya tujuan”. Sedangkan menurut Badudu dan Zain Proses adalah “jalannya suatu peristiwa dari awal sampai akhir atau masih berjalan tentang suatu perbuatan, pekerjaan dan tindakan”.

Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa Proses merupakan suatu tahapan-tahapan yang diterapkan dari suatu pekerjaan sehingga hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut mampu menggambarkan baiknya prosedur yang digunakan. Dalam melaksanakan suatu pekerjaan perlu adanya proses yang tepat agar setiap

pekerjaan dapat diselesaikan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan.

#### **1.4.2 Laporan Keuangan**

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1 (2015) laporan keuangan “adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”. Sedangkan Menurut Harahap (2015:105) Laporan Keuangan adalah “laporan yang menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.”

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah suatu bentuk pelaporan hasil akhir dari proses akuntansi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu.

##### **1.4.2.1 Tujuan Laporan Keuangan**

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1 (2015), tujuan dari laporan keuangan ialah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik.

##### **1.4.2.2 Jenis-jenis Laporan Keuangan**

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1 (2015), komponen keuangan yang lengkap terdiri atas:

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode.

2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode.
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode.
4. Laporan arus kas selama periode.
5. Catatan atas laporan keuangan
6. Laporan posisi keuangan

#### **1.4.3 Laporan Keuangan Sektor Publik**

Menurut Indra (2014:6) “Akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada lembaga tinggi negara beserta departemen di bawahnya untuk penerapan pengelolaan berbagai dana masyarakat”.

Menurut Halim (2014:18) “akuntansi sektor publik merupakan kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif yang bersifat keuangan berdasarkan entitas pemerintah yang berguna sebagai pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan”.

##### **1.4.2.1 Tujuan dan fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik**

Menurut Mardiasmo (2002) menyebutkan bahwa tujuan dan fungsi Laporan Keuangan yaitu sebagai berikut:

- a. Ketaatan pada peraturan serta kepengurusan (compliance and stewardship)
- b. Akuntabilitas dan pelaporan informasi historis.(accountability and restrospective reporting)

- c. Informasi yang berkaitan dengan perencanaan dan otorisasi(planning and authorization information)
- d. Kelangsungan hidup organisasi.(visibility)
- e. Hubungan dengan publik (public relation).
- f. Asal usul data dan statistik (source of facts and figuraes).

#### **1.4.2.2 Aspek Laporan Keuangan Sektor Publik**

Menurut Mardiasmo (2002) menyebutkan bahwa aspek aspek Laporan Keuangan sebagai berikut:

- a. Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan anggaran.
- b. Kepatuhan terhadap regulasi.
- c. Efektivitas pelaksanaan anggaran.
- d. Efisiensi pelaksanaan kegiatan. Aspek ini berkesinambungan dengan proses pengajuan SPM ke KPPN.

#### **1.4.2.1 Komponen Laporan Keuangan Sektor Publik**

Menurut Freddy (2019), Laporan Keuangan Sektor Publik terdiri dari 6 komponen, yaitu:

- 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 2. Laporan Perubahan SAL
- 3. Neraca
- 4. Laporan Operasional (LO)
- 5. Laporan Arus Kas (LAK)
- 6. Laporan Perubahan Ekuitas

## 7. Catatan atas Laporan Keuangan

### 1.4.4 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi

Prosedur penyusunan laporan keuangan konsolidasi ini terdiri atas dua tahap utama, yaitu:

1. tahap penyusunan spreadsheet konsolidasi
2. tahap penyusunan laporan keuangan konsolidasi pemerintah daerah sebagai entitas untuk tujuan pelaporan.

#### 1. Langkah 1 (*Worksheet*)

- a. PPK-SKPD akan memasang spreadsheet 10-arah sebagai alat pelaporan keuangan. Dalam proses penyusunan laporan keuangan, lembar kerja merupakan alat yang penting. Spreadsheet adalah alat yang dapat digunakan untuk memfasilitasi pembuatan laporan keuangan secara manual. PPK-SKPD membuat neraca saldo dengan menyajikan kembali saldo buku besar secara keseluruhan. Nilai yang mewakili saldo di setiap akun buku besar disalin ke kolom neraca saldo pada lembar kerja. Hal ini dilakukan sesuai dengan posisi debet atau kredit yang ada dalam saldo akun buku besar yang bersangkutan.
- b. PPK-SKPD membuat entri modifikasi. Entri jurnal ini dibuat dengan tujuan untuk mengidentifikasi transaksi yang masih harus dibayar dan memperbarui saldo dalam akun yang sesuai. Di Kertas Kerja, kolom berlabel Penyesuaian adalah tempat item penyesuaian harus dimasukkan.

Jurnal Penyesuaian yang ada SKPD meliputi setidaknya :

- a) Koreksi kesalahan pencatatan.

adalah koreksi buku besar yang membahas kesalahan yang terjadi selama penjurnalan transaksi. Alih-alih menunggu sampai akhir tahun untuk membuat koreksi atas entri yang salah, mereka harus dilakukan segera setelah diketahui bahwa telah terjadi kesalahan.

b) Pengakuan aset, hutang, dan ekuitas.

merupakan pengakuan perolehan aset oleh SKPD, yang meliputi pengakuan piutang, persediaan, dan utang. Akuisisi aset dilakukan oleh SKPD. Selama ini, pengakuan aset tetap SKPD memiliki kaitan yang kuat dengan belanja modal perusahaan.

c) Jurnal depresiasi

Merupakan jurnal depresiasi terhadap aset yang dimiliki oleh SKPD.

d) Jurnal terkait dengan transaksi yang bersifat accrual dan prepayment

Merupakan jurnal yang dibuat karena adanya transaksi-transaksi yang telah dilakukan oleh SKPD namun belum terdistribusi (akrual), atau telah terjadi transaksi distribusi kas untuk pengeluaran-pengeluaran yang akan datang. Kedua skenario ini mengakibatkan perlunya entri dalam jurnal (pembayaran di muka). Bukti memorial yang dikaitkan dengan bukti transaksi yang digunakan dalam jurnal penyesuaian digunakan sebagai bukti transaksi jika tersedia. Entri Jurnal Penyesuaian awalnya dimasukkan ke dalam Buku Jurnal Umum, dan kemudian dipindahkan ke Buku Besar..

c. PPK-SKPD melakukan penyesuaian yang diperlukan terhadap neraca saldo berdasarkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya. Dalam

Kertas Kerja, nilai yang telah diubah dimasukkan ke dalam kolom berlabel Saldo Setelah Penyesuaian.

- d. Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuaikan, PPK-SKPD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran dan memindahkannya ke kolom Laporan Realisasi Anggaran yang terdapat pada Kertas Kerja.
- e. PPK-SKPD menganalisis Neraca Saldo yang direvisi untuk menentukan akun-akun yang termasuk dalam komponen Neraca dan kemudian memindahkan akun-akun tersebut ke kolom Neraca pada Kertas Kerja.
- f. PPK-SKPD mampu menghasilkan Laporan Keuangan, yang meliputi Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran, berdasarkan kertas kerja yang telah diselesaikan. Karena PPK-SKPD belum membuat Jurnal Penutupan, maka neraca yang dihasilkan belum bisa dianggap definitif saat ini.

## 2. Langkah 2 (Jurnal Penutup)

Pada akhir periode akuntansi, Anda perlu membuat entri jurnal yang disebut Jurnal Penutupan agar saldo nominal kembali ke nol. Taksiran yang dikenal dengan taksiran nominal adalah taksiran yang digunakan untuk Laporan Realisasi Anggaran yaitu untuk Pendapatan dan Beban.

### 1.5 Tujuan Praktek Kerja Lapangan

Dengan melaksanakan praktek kerja lapangan (PKL) diharapkan dapat mencapai beberapa tujuan, yakni sebagai berikut:

1. Memenuhi syarat kelulusan pada program studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura

2. Menganalisa permasalahan yang terjadi didalam perusahaan dan berupaya untuk memberikan saran perbaikan
3. Mengetahui kegiatan yang berhubungan langsung dengan topik yang ada di lapangan
4. Mempraktekkan soft skill dan hard skill yang didapat dalam masa kuliah

#### **1.6 Manfaat Praktek Kerja Lapangan**

Tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak diantaranya:

a. Manfaat PKL bagi penulis

Menambah pengetahuan dan memperluas wawasan secara langsung bagaimana praktek didalam dunia kerja dan mendapatkan pengalaman kerja selama di Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bangkalan.

b. Bagi Universitas Trunojoyo Madura Jurusan Diploma III Akuntansi

Menjadi suatu tolak ukur suatu pembelajaran dan sarana peningkatan kualitas pengajaran di masa yang akan datang

c. Bagi Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kabupten Bangakalan

Diharapkan dari hasil praktek kerja lapangan ini memberikan kontribusi, dan manfaat bagi kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan

d. Bagi Pembaca

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk pelaksanaaan praktik kerja lapangan yang sejenis di waktu yang akan datang.

## **1.7 Rencana Kegiatan**

Praktik kerja lapangan dilaksanakan di Badan Perencanaan dan Keuangan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan yang berlokasi di Jl. Soekarno-Hatta No.35, Kemayoran, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan. Pada tanggal 10 Januari dan berakhir pada tanggal 28 Februari 2022, di bidang Perencanaan dan Keuangan.

**Tabel 1. Rencana Kegiatan Praktik Kerja Lapangan**

| No | Nama Kegiatan                        | Nov 2021 |   |   |   | Des 2021 |   |   |   | Jan 2022 |   |   |   | Feb 2022 |   |   |   | Mar-21 |   |   |   | Apr-21 |   |   |   | Mei 2022 |   |   |   | Jun 2022 |   |   |   | Jul 2022 |   |   |   |
|----|--------------------------------------|----------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|---|---|---|--------|---|---|---|--------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|---|---|---|
|    |                                      | 1        | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 | 1      | 2 | 3 | 4 | 1      | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 |
| 1  | Persiapan topik & tempat PKL         |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |
| 2  | Pengajuan izin lokasi                |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |
| 3  | Arahan dan pembekalan PKL            |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |
| 4  | Penetapan dosen pembimbing           |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |
| 5  | Pelaksanaan kegiatan PKL             |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |
| 6  | Penyusunan dan Penulisan Laporan PKL |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |
| 7  | Konsultasi Dosen Pembimbing          |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |
| 8  | Presentasi Laporan PKL               |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |

## **1.8 Metode Penulisan**

### **1.8.1 Metode Analisis Data**

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis menggunakan metode analisis data kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, karena menurut penulis metode ini yang paling sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan penulisan tugas akhir oleh penulis. Metode analisis deskriptif dilakukan dengan metode mengumpulkan data, mengolah data kemudian menyajikan data observasi dengan tujuan pihak lain dapat mudah memperoleh gambaran mengenai objek yang diteliti dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

Penelitian deskriptif yang dipakai dalam penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan dan memberikan gambaran tentang penerapan Standar Akuntansi Keuangan Daerah yang dilihat dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Perencanaan dan Keuangan.

### **1.8.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data**

Salah satu pertimbangan dalam memilih suatu penelitian adalah ketersediaan sumber data yang merupakan salah satu yang terpenting untuk menyusun Tugas Akhir, karena sumber data memberikan informasi untuk memperoleh data-data yang akan disajikan dan dijabarkan dalam isi pembahasan Tugas Akhir ini. Dalam rangka memperoleh data-data dalam tugas akhir ini maka dibutuhkan teknik pengumpulan data sebagai langkah-langkah serta strategi dari penulis sehingga data-data yang diperlukan atau dibutuhkan dalam penyusunan tugas akhir dapat diperoleh dengan baik.

#### **a. Sumber Data**

Sumber data merupakan bagian yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam melakukan penyusunan tugas akhir ini, karena sumber data merupakan sumber dimana informasi yang didapat baik secara langsung maupun tidak langsung untuk dijadikan sebagai data yang akan dibahas oleh penulis dalam isi pembahasan penyusunan tugas akhir ini, untuk mendapatkannya penulis memerlukan teknik pengumpulan data yang menjadi langkah strategis untuk penyusunan tugas akhir ini.

Sumber data terbagi dua yaitu:

##### **1. Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung diberikan kepada pengumpul data. Sumber data primer, yakni penuturan atau kepada catatan para saksi mata. Data tersebut dilaporkan oleh pengamat atau partisipan yang benar-banar menyaksikan suatu peristiwa. Data primer dalam penelitian berupa data yang didapat secara langsung dari pihak yang terlibat yaitu berupa wawancara atau interview terhadap Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Kantor Sekretariat Daerah.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh penelitian dari subyek penelitiannya, misalnya diperoleh melalui buku, undang-undang, dokumen, catatan, atau bukti historis yang telah terarsip. Adapun data sekunder yang

dipakai dalam penelitian tugas akhir ini adalah Struktur Organisasi dan Laporan Keuangan

#### **b. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang strategis untuk digunakan dalam suatu penelitian agar dapat mengetahui dan mendapatkan pengetahuan secara mendalam mengenai fenomena yang terjadi dilapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini memakai metode riset pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi.

##### **1. Wawancara**

Menurut Sugiyono (2015:72) wawancara adalah “pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu”.

Wawancara merupakan hal yang paling sering dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan informasi mengenai masalah yang akan diteliti. Dalam pelaksanaan pengumpulan data di lapangan ini dengan menggunakan wawancara secara langsung dan mendalam (in depth interview) kepada pihak yang terlibat dan terlibat langsung untuk memperoleh penjelasan pada keadaan yang sebenarnya. Pada teknik wawancara ini penulis melakukan wawancara kepada : Bapak Arief selaku Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan

##### **2. Dokumentasi**

Menurut Sugiyono (2018:476) dokumentasi adalah “suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian”

Dokumentasi ini menjadi salah satu teknik pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dari Kantor Sekretariat Daerah Bidang Perencanaan dan Keuangan Kab.Bangkalan. Pada teknik dokumen yang diperoleh yaitu Laporan Keuangan Tahunan

### 3. Studi Pustaka

Dalam hal ini penulis juga melakukan pengambilan data melalui studi pustaka dalam buku, jurnal, atau website yang berhubungan dengan topic yang telah penulis tentukan sebagai landasan teori yang digunakan.

#### **1.8.3 Teknik Analisis Data**

Menurut Situmorang dan Dalimunthe (2010) Data adalah “sekumpulan informasi yang didapat dari suatu pengamatan yang bisa berupa angka atau lambing atau sifat. Beberapa contoh data antara lain data populasi dan data simple, data primer, dan data sekunder”.

Dalam penulisan tugas akhir ini metode yang digunakan yaitu metode pendekatan deskriptif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menjelaskan tentang fenomena secara nyata dan sistematis. Tujuan penelitian deskriptif yaitu menjelaskan tentang suatu fenomena yang diteliti secara nyata dan aktual dengan membuat deskripsi atau gambaran fenomena tersebut secara sistematis.